



AKUNTANSI PADA ERA INFLASI LUAR BIASA

VERSI IPSAS 10

Sajian Dr Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Seperti biasa, pembaca dimohon meyakini risiko kedangkalan & risiko sesat-tafsir makalah kami dengan memperluas wawasan-ilmiah, antara lain dengan tambahan rujukan afdol lain.

Seperti biasa pula, petikan dan ringkasan (bukan kuotasian) hasil riset ini dibatasi ketertarikan penulis pada paragraf tertentu saja pada berbagai sumber rujukan. Pada beberapa negara, tingkat inflasi luar-biasa dapat mencapai skala triliun persen. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 60 negara berisiko inflasi luar-biasa.

KEBIJAKAN REDENOMINASI

Sampai awal Juli 2023 tertengarai bahwa NKRI belum menerbitkan kebijakan redenominasi Rupiah, Kabinet cq Kemenkeu dan BI selalu mengambil sikap amat hati-hati terekait isu redonominasi. Terdapat berbagai upaya penyesatan informasi redenominasi yang segera dijernihkan pemerintah.

Sumber Copyright © 2013-2023 menyajikan artikel berjudul **Hubungan Redenominasi dan Inflasi**, antara lain mengungkapkan bahwa redenominasi adalah langkah yang biasanya diambil untuk menyederhanakan pemahaman, penggunaan, dan manajemen mata uang nasional melalui mata uang yang lebih baru dan lebih kecil, namun tetap memiliki nilai yang sama seperti sebelumnya. Program redenominasi adalah kegiatan eliminasi sekumpulan angka nol bagian terakhir pada mata uang, sebagai skala moneter baru pada mata uang nasional, seperti: harga barang dan jasa yang dijual, gaji, tabungan, pensiun, hutang, pinjaman, dan bentuk pembayaran lainnya, termasuk nilai tukar mata uang, pajak, dll. Inflasi merupakan masa-masa di mana mata uang sebuah negara memiliki daya beli yang lemah. Harga barang dan jasa harus ditulis dengan angka yang besar dan saat angka-angka ini terus membesar, imbasnya tidak hanya pada transaksi sehari-hari tapi juga dapat berpengaruh pada persepsi manusia. Ketidaknyamanan dalam menghadapi tagihan dengan angka yang besar serta risiko yang harus mereka hadapi pasti akan memainkan peran pada kondisi psikologis manusia. Negara-negara yang menderita akibat tingginya inflasi harus berhadapan dengan tingginya harga serta ketidakpraktisan yang mengiringinya. Hal ini dapat terus berlangsung bahkan bila negara tersebut lantas mengalami penurunan tingkat inflasi (*disinflation*). Salah satu cara untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan redenominasi. Mata uang yang lama digantikan dengan mata uang yang baru. Dan bila memang alasan redenominasi adalah inflasi, maka rasio konversi akan dapat melebihi angka 1, atau merupakan kelipatan angka 10 seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Karena itulah redenominasi disebut sebagai

pengurangan angka nol pada mata uang. Secara konseptual, redenominasi seyogyanya dijaga dengan berbagai kebijakan pelaksanaan agar tidak berimbas-negatif pada perekonomian mikro dan makro secara langsung, permintaan dan penawaran (*demand and supply*) terhadap barang dan jasa, nilai investasi, pembelanjaan negara, nilai ekspor, dan tingkat konsumsi rumah tangga. Inflasi tinggi merupakan indikasi bahwa pemerintah tidak mampu untuk menyeimbangkan anggaran, bank sentral pun gagal mengendalikan inflasi. Meski analisis sebuah penelitian(1) menunjukkan bahwa inflasi merupakan faktor pendorong utama sebuah negara melakukan redenominasi, namun bukan berarti ia merupakan faktor satu-satunya. Faktor lainnya adalah nilai pertukaran mata uang dan bentuk pemerintahan, yang sifatnya tidak mendorong terjadinya redenominasi secara signifikan.

Contoh redenominasi adalah sebagai berikut. Parlemen Turki memutuskan untuk memangkas enam angka nol dari mata uang mereka di tahun 2003 dan redenominasi resmi dilakukan per 1 Januari 2005 hingga akhir 2005. Sejak 1 Januari 2009, uang lira yang lama sudah tidak lagi menjadi alat pembayaran yang sah di Turki. Kredibilitas mata uang mereka meningkat, rekening keuangan mereka menjadi lebih sederhana, dan urusan dengan mata uang menjadi lebih mudah untuk semua subjek pasar. Hasil observasi penelitian(2) menunjukkan bahwa meski terjadi penurunan dalam level pertumbuhan harga di awal pengenalan redenominasi, selanjutnya level pertumbuhan harga justru mengalami peningkatan. Hal ini dibarengi dengan tarif pertumbuhan *money supply*. Selain berimbas pada faktor keuangan di Turki, redenominasi juga dianggap berhasil meningkatkan aspek psikologis, yang juga merupakan salah satu efek inflasi yang telah kami sebutkan di atas. Dengan melakukan redenominasi, pihak otoritas seperti pemerintah merasa mampu untuk meyakinkan subjek pasar bahwa mereka serius dalam mengontrol inflasi yang sedang terjadi. Sebagai kesimpulan; sulit untuk menentukan apakah penurunan inflasi hanya dipengaruhi oleh redenominasi yang dilakukan oleh pemerintah Turki, namun para peneliti setuju bahwa redenominasi mungkin memiliki dampak secara langsung terhadap inflasi dengan membantu mengurangi harapan inflasi dan membawa kondisi ekonomi Turki pada stabilitas level harga.

Sumber yang sama menyajikan artikel berjudul **Negara yang Gagal Redominasi**, antara lain mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian suatu negara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi apakah redenominasi akan berhasil atau tidak. Indonesia harus memiliki perekonomian yang relatif stabil dan terkendali sebelum menerapkan redenominasi rupiah, penetapan redenominasi memerlukan proses dan transisi dari mata uang lama ke mata uang baru sekitar lima hingga tujuh tahun. Sejarah mencatat, enam kali melakukan redenominasi, **Brazil** mengalami kegagalan saat menerapkannya di tahun 1986. Saat itu, mata uang baru yaitu *crúzado* mengalami penurunan nilai secara drastis terhadap dolar Amerika, disebabkan tingkat inflasi mencapai hingga 500% dan kurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Brazil berhasil dalam penetapan redenominasi pada tahun 1994, mengurangi inflasi dan meningkatkan devisa modal asing yang masuk. Setelah menerapkan redenominasi pada tahun 1947 dan 1961, **Rusia** mengalami kegagalan saat menerapkannya di tahun 1998. Rusia mengurangi nominal 3 digit nol dari mata uang karena inflasi mencapai 28%. Penerapan redenominasi tersebut tidak didukung upaya keyakinan terhadap publik mengenai ketetapan harga, **rakyat Rusia menganggap redenominasi adalah bentuk perampokan kekayaan privat oleh pemerintah**. Praktik redenominasi pada tahun 1998 gagal, menyebabkan inflasi semakin tinggi hingga mencapai 86%. Tahun 2009, **Korea Utara** menerapkan kebijakan redenominasi dengan mengurangi nominal nol sebesar 2 digit dari mata uang yaitu dari 100 won menjadi 1 won, rakyat berlomba-lomba mengumpulkan mata uang baru yang beredar sehingga terjadi kelangkaan stok uang baru di masyarakat, munculnya oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan menggelar pasar gelap guna

memfasilitasi mereka yang hendak menukarkan uang won-nya menjadi yuan atau dolar. Masyarakat Korea Utara kala itu memang berpikir lebih baik menyelamatkan uang mereka dengan menukarnya pada mata uang asing daripada tidak bisa dipakai karena sudah tak bernilai. Negara **Zimbabwe** mengalami kegagalan redenominasi saat mengurangi nominal 10 digit nol dari mata uang, yaitu dari 10 miliar dolar menjadi 1 dolar Zimbabwe, terjadi pada tahun 2001 ketika pemerintah Zimbabwe menimbang bahwa redenominasi dapat mengatasi permasalahan inflasi yang terjadi, ternyata kebijakan tersebut justru semakin meningkatkan inflasi dan memicu kenaikan harga menjadi sangat tinggi.

KONDISI PEREKONOMIAN NKRI

Merdeka.com, 2022, menyajikan artikel berjudul **Pemerintah Pastikan Indonesia Tak Akan Alami Krisis Ekonomi, ini Alasannya**, antara lain mengungkapkan karena sejak sebelum pandemi terjadi, pemerintah sangat disiplin dalam mengelola standar kebijakan fiskal. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter sejak lama bersifat prudent dan konservatif. Kebijakan fiskal NKRI disiplin, selalu menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB dan utang pemerintah dijaga di bawah 30 persen dari PDB. Tingkat inflasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir masih di bawah 5 persen, neraca berjalan mengalami surplus terdapat keuntungan kenaikan harga komoditas misalnya pada ekspor nikel, batubara, CPO dan yang lain-lain. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter ini sejak lama prudent dan konservatif. Kebijakan fiskal kita disiplin, defisit kita di bawah 3 persen dari PDB dan utang kita di bawah 30 persen dari PDB.

Adminkesbangpol, 2022, menyajikan artikel berjudul **Momok Inflasi Dan Tahun 2023 Yang Gelap**, antara lain mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menyebut ketidakpastian global saat ini sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara inflasi melonjak. Dia menyebut sudah ada 5 negara yang inflasinya melonjak hingga di atas 80 persen. Sementara di Indonesia, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan dua kali ke posisi 4,25 persen belum lama ini. Sementara inflasi Indonesia per Agustus 2022 mencapai 4,69 persen dan diprediksi tembus 6 persen di akhir tahun ini. "Ini pertama kali saya sampaikan, momok terbesar adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa. Momok semua negara saat ini. Biasanya cuma (inflasi) 1 persen, sekarang ada yang 8 (persen, bahkan ada yang 80 persen (inflasi)," kata Jokowi dalam memberikan pengarahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati, di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti, tantangan dan ketidakpastian global akan semakin gelap pada tahun depan. Berbagai krisis yang terjadi, seperti krisis pangan, energi, finansial, dan juga ancaman resesi yang akan terjadi pun tak bisa dikalkulasi. Krisis yang terjadi di Inggris saat inipun berdampak langsung pada nilai tukar mata uang di semua negara sehingga semakin melemah, **termasuk di Indonesia**. Perang di Ukraina yang juga belum akan berhenti dalam waktu dekat pun semakin menyulitkan kondisi ekonomi dunia saat ini. Krisis pangan yang terjadi saat ini telah menyebabkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Sedangkan 19.700 orang di dunia tiap harinya meninggal karena kelaparan. Namun, krisis pangan tak terjadi di Indonesia. Indonesia juga telah mendapatkan sertifikat pengakuan swasembada beras sejak 2019 dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari **International Rice Research Institute**. Jokowi kemudian mengingatkan jajarannya agar tidak senang dulu meski Indonesia mendapat sertifikat swasembada pangan dan ketahanan pangan yang baik dari lembaga internasional. Untuk mengatasi masalah inflasi dan tahun 2023 yang akan gelap, Presiden Jokowi ingin masalah tersebut ditangani oleh semua pihak

dan elemen bangsa. Kekompakan antara pemerintah pusat, daerah, sampai elemen masyarakat bawah seperti saat mengatasi pandemic covid-19 akan bisa mengatasi inflasi dan melewati tahun 2023 yang akan gelap.

Terdapat berbagai negara lain mengalami masalah keuangan negara. Utang pemerintah Sri Lanka yang mencapai 87 % PDB sebelum pandemi, defisit fiskal tahun 2019 mencapai 9,6 % PDB. Sampai tahun 2019, utang Pemerintah Pakistan mencapai 86 % PDB dan defisit fiskal 9,1 % PDB.

Disimpulkan di muka, bahwa inflasi luar biasa kemungkinan kecil terjadi di Indonesia.

ASUMSI UNIT MONETER NAN STABIL

True Tamplin, 2021, menyajikan makalah berjudul *Monetary Unit Assumption*, menjelaskan antara lain berbagai hal sebagai berikut. Asumsi unit-moneter atau konsep pengukuran uang mewajibkan seluruh catatan akuntansi atas transaksi, aset, utang dan ekuitas dinyatakan dalam suatu satuan moneter, biasanya mata-uang fungsional negara domisili entitas LK. Transaksi misalnya adalah transaksi jual-beli, pinjam-meminjam atau kredit, barter, waris, atau hadiah bukan berbentuk uang dan bukan uang-kartal. Berbagai perusahaan multinasional menggunakan beberapa-mata uang. Terdapat aset, kewajiban, transaksi yang tak-mudah bahkan tak-dapat di ukur dalam satuan-mata uang. Berbagai masalah diselesaikan oleh SAK, antara lain (1) masalah pihak-pihak bertransaksi barter tak mampu menetapkan nilai barang/jasa dipertukarkan, (2) hadiah barang tak bernilai pasar dan berbagai transaksi lain, (3) pihak pemilik aset kebun kelapa-sawit tak mampu menentukan nilai pohon kelapa sawit yang tumbuh makin besar dan/atau mengalami peralihan status TBM menjadi TM , menggunakan rujukan harga-pasar beberapa kebun-tetangga sejenis.

Matt Petryni , 2017, menyajikan artikel berjudul *The Stable Monetary Unit Concept of Accounting*, menjelaskan berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Konsep unit-moneter nan-stabil mengasumsikan nilai suatu mata uang selalu stabil lintas waktu cq lintas periode LK , tak mempertimbangkan dampak inflasi , merupakan asumsi-naif bertujuan kepraktisan dalam berakuntansi. Konsep tersebut membiarkan inflasi menyatakan dirinya pada perubahan harga, misalnya sebuah perusahaan membeli 4 almari pendingin merek, jenis & ukuran tertentu untuk keperluan kantor pada tahun 2021 dengan harga Rp.12 juta perunit, perusahaan tersebut membeli tambahan 4 almari tepat sama pada penjual yang sama tahun 2023 dengan harga Rp. 13 juta perunit, pada situasi inflasi sekitar 4 - 5 % pertahun , karena penjual mempertimbangkan inflasi pada satu sisi, uzur model/keluaran pada sisi lain. Pada sisi lain, pembeli memahami turun-daya beli mata-uang karena inflasi , sehingga wajar kalau harga baru meningkat.

TEORI INFLASI

Nikita Dutta, 2021, menyajikan artikel *Inflation: Types, Causes and Effects (With Diagram)*, menjelaskan antara lain sebagai berikut.

Pertama, Jenis Inflasi Berbasis Sebab

1. Inflasi Mata Uang (*Currency Inflation*), adalah inflasi karena cetak-uang kartal.
2. Inflasi Kredit (*Credit Inflation*) karena ekspansi kredit industri perbankan menyebabkan jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat.

3. Inflasi karena pemerintah cq inflasi disebabkan mencetak uang-kartal untuk menutup defisit APBN.
4. Inflasi karena Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*) , akibat jumlah uang beredar meningkat, penghasilan masyarakat bertambah besar, gairah membeli meningkat , terjadi perebutan pembelian atas pasok barang/jasa tetap/terbatas, menyebabkan harga-harga naik.
5. Inflasi Terdorong Biaya (*Cost-push Inflation*) pada suatu perekonomian di mana harga-harga umum input meningkat , misalnya harga bahan baku, imbalan kerja, tarif air, listrik, tol dll meningkat, menyebabkan harga pokok barang/jasa peningkat, mendorong harga-jual meningkat. Kenaikan gaji umum arena gerakan serikat-buruh , menyebabkan kenaikan gaji sia-sia , karena inflasi.

Kedua, Jenis inflasi Berbasis Kecepatan dan Intensitas

1. Jenis Inflasi Merangkak Lembut (*Creeping or Mild Inflation*), digambarkan oleh kenaikan harga-harga umum lambat , tak-ketara atau tak-terasa, namun pasti , sekitar 2 atau 3 % pertahun atau lebih besar sedikit.
2. Inflasi Berjalan (*Walking Inflation*) adalah bila kenaikan harga umum diantara 3 % sampai 4% pertahun, tergolong inflasi moderat. Berbagai pakar bahkan berpendapat inflasi digit tunggal (*single digit inflation*) adalah inflasi sedang-sedang saja, bila terprediksi & terkendali , menyebabkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Apabila mendekati 10 % , apalagi terjadi tak terduga, akan menghasilkan panik masyarakat, karena berpotensi menjadi *running inflation*.
3. Inflasi Cepat (*Running Inflation*) , inflasi tak beraturan (*Galloping*) dan Inflasi-Hiper. Inflasi moderat dapat/mudah pindah-kelas menjadi berbahaya apabila tak-terkendali, tak terprediksi lagi (*Galloping & Hyperinflation*) , pada awalnya ditandai inflasi-berdigit-ganda (double digit inflation) menuju inflasi dalam ratus %, ribu %, miliar %, triliun %.
4. Reaksi Pemerintah Terhadap Inflasi, pada sistem pemerintah terbuka, mengungkap kinerja inflasi apa adanya dan upaya mengatasi, terdapat pemerintahan yang tak terlampaui transparan dengan sistem kurs-terpasung.

Ketiga, Sebab Musabab Inflasi

1. Kenaikan permintaan tak dimbangi kenaikan pasok , atau peristiwa lain yang mirip, misalnya penurunan pasok lebih besar dari penurunan permintaan. Mazhab Keynes membelah permintaan (demand) menjadi permintaan konsumsi, investasi dan pemerintahan.
2. Teori Inflasi Tarikan-Permintaan.
Pertama, Mazhab Moneter menyatakan pada wilayah-kondisi-ekonomi berpengerjaan-penuh (full employment economics) , pasok uang berlebih meningkatkan permintaan-agregat, sehingga meningkatkan inflasi.
Kedua, Mazhab Keynes berpendapat bahwa penurunan tarif-pajak menyebabkan belanja-konsumsi meningkat, meningkatkan investasi dan belanja APBN, ditambah gairah mencetak uang, menyebabkan inflasi meningkat.

Kenaikan jumlah penduduk meningkatkan permintaan-agregat, penghasilan ekspor meningkatkan daya-beli negara peng-ekspor.

CPI disebabkan kenaikan-imbalan kerja terdorong inflasi , kenaikan laba-terdorong-inflasi, kenaikan harga-barang/jasa input yang di impor, antar lain harga migas internasional,kenaikan pajak tertentu sebagai unsur CPI, keusangan mesin dan teknologi, inefisiensi dan korupsi.

Keempat, Teori Dampak Inflasi

1. Inflasi terkait keinginan masyarakat pembeli untuk beli murah, keinginan masyarakat penjual untuk jual-mahal.
2. Dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan.
Selama inflasi, pada umumnya manusia mengalami kenaikan penghasilan , sebagian kenaikan lebih besar dari tingkat kenaikan harga umum, sebagian lagi lebih kecil. Peminjam kredit memperoleh keuntungan inflasioner, sebaliknya pemberi kredit merugi-inflasioner. Peminjam kredit-rumah tinggal berjangka 10 tahun berharap inflasi terus meningkat, karena perjanjian angsuran tak terkoreksi inflasi vs harga real-estate terus meningkat. Kekuatan uang diterima sepuluh tahun lalu mungkin jauh lebih tinggi dari kekuatan uang-angsuran kredit pulus bunga.
3. Dampak inflasi kepada kreditur dan debitur.
4. Peminjam untung, pemberi pinjaman merugi , karena nilai-uang cq daya-beli (purchasing power) saat diterima peminjam jauh lebih tinggi dibanding saat pengembalian tertambah bunga. Peminjam memperhitungkan tingkat iflasi dalam suku-bunga pinjaman.
5. Dampak inflasi pada Pemegang Obligasi.
Para pemberi pinjaman atau pemegang-obligasi berpenghasilan bunga dengan suku-bunga tetap , menderita , karena (1) penghasilan-nyata bunga adalah tarif-bunga dikurangi tingkat-inflasi, (2) pokok pinjaman diterima kembali dalam jumlah sama dengan yang diberikan, karena nilai-sejati merosot.
6. Investor menerima penghasilan deviden, dengan ROE mungkin lebih-besar atau lebih kecil dibanding tingkat-inflasi. ROE dikurang tarif-inflasi adalah penghasilan sejati investor.
7. Penerima imbalan kerja berkala berjumlah tetap, nilainya digerus tarif-inflasi , terdapat kebijakan pemberi-kerja berbentuk kenaikan-berkala sebesar tarif-inflasi. Terdapat serikat buruh yang berupaya mempertahankan daya konsumsi imbalan-kerja tergerus-inflasi dengan unjuk-rasa (purchasing-power parity demo).
8. Pedagang dengan tarif-margin (% laba bruto) dibawah tarif inflasi , berisiko bertambah miskin tiap tahun. Upaduta Niaga membandingkan rerata-hasil-perantara tahunan tahun lalu dengan tahun-terakhir yang terkoreksi inflasi untuk mengetahui penghasilan sejati.
9. Dampak Inflasi pada Produksi dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Inflasi tak mendorong output sektor riil meningkat.
 - Pada kondisi ekonomi bukan ber-pengerjaan-paripurna (full employment), inflasi menguntungkan sektor riil.
 - Pada umumnya inflasi mendorong kenaikan-tingkat-harga perunit barang/jasa, namun kenaikan-laba-sejati muncul tatkala laba-jual-baru memberi lebihan yang dapat menutup tingkat-inflasi, bila berterima konsumen, akan mendorong gairah investasi.
 - Kenaikan harga-jual karena inflasi berdampak pada sisi permintaan yang berisiko mengecil , pada kelompok konsumen berpenghasilan-tetap.

- Kenaikan laba-pengusaha akibat inflasi dihantui oleh kenaikan harga-bahan-baku, kenaikan upah-pekerja dan kenaikan tarif-umum FOH seperti tarif PAM, Tol dan Listrik.
- Inflasi luarbiasa menakutkan rumah-tangga, kelangsungan perumahan terdistorsi kepemilikan tunai (tabungan) yang semakin tidak-berdaya-beli, terjadi perubahan pola konsumsi dan pola investasi terfokus investasi-tahan-inflasi seperti deposito dalam valuta negara-negara rendah-inflasi, investasi properti, emas, berlian bila cepat naik harga lantaran inflasi, dll. Di Indonesia, perbankan memberi suku-bunga deposito lebih kecil dari laju-inflasi, sehingga daya-beli-sejati para deposan menyusut sebesar *selisih tarif tersebut*.
- Inflasi kecil, lambat dan terkendali mendorong pertumbuhan PDB.

Penulis berpendapat bahwa CALK perlu menyajikan (1) tingkat-inflasi periode LK banding tingkat inflasi 5 periode LK sebelumnya, (2) aset-neto akhir-periode tersesuai nilai-tukar awal-periode vs aset-neto awal periode, **atau** aset-neto akhir-periode vs aset-neto awal periode tersesuai tingkat-inflasi sepanjang periode LK.

TEORI INFLASI LUARBIASA

Berbagai standar akuntansi internasional menetapkan kondisi inflasi luar biasa dengan akumulasi laju-inflasi mencapai 100 % dalam bingkai waktu 3 tahun, ditambah berbagai gejala umum lain seperti penggunaan mata-uang dalam transaksi dagang dan simpanan menggunakan mata-uang-asing yang stabil-nilai. Tim McMohan, 2012, menyajikan artikel *What is Hyperinflation?*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Inflasi-hiper antara lain karena pencetakan uang-kartal nirbatas. Pada tahun karangan, pengarang menyatakan bahwa belum ada perubahan % inflasi-lazim menjadi inflasi-hiper, dengan pemburukan panjang tingkat-inflasi dalam bentuk kurva-hiperbola. Contoh klasik adalah inflasi-hiper Weimar Germany dan kasus lebih baru adalah Zimbabwean Hyperinflation yang mencapai 2,2 juta %. Kenaikan harga-harga umum terjadi harian, jam-jam an bahkan kenaikan harga pada skala menit, sehingga muncul sendagurau bahwa anda sebaiknya pesan dua cangkir kopi sekaligus di warung kopi, ketimbang pesan satu cangkir dan kemudian (pada menit lain) anda pesan satu cangkir lagi.

Sejarah dunia tentang inflasi-hiper mencatat bahwa pada era 1861-1865 inflasi-hiper mencapai 1.200 banding 1, Austria pada periode 1914-1923 antara lain mencapai 1.426 % , pada tahun 1922 dengan CPI berfaktor 11.836, Jerman pada periode 1914-1923 mencapai 1 miliar banding 1, Hungaria pada periode 1919 -1924 mencapai 98 % perbulan pada tahun 1922, Polandia pada periode 1918-1924 mencapai 800.000 banding 1, Yunani (Greece) pada periode 1942-1953 mencapai 50 T banding 1, Hungaria pada periode 1945-1946 mencapai 400 Oktiliun (yaitu angka 400 diikuti dengan 27 bilangan 0 dibelakangnya) banding 1, RRC pada periode 1947-1949 mencapai 15 Kuantiliun (15 dan 18 angka nol) banding 1, Brazil pada periode 1967-1994 mencapai 2.750 Kuadriliun (yaitu angka 2.750 ditambah 15 angka nol dibelakangnya) banding 1, Meksiko pada periode 1982- 1993 mencapai 10.000 %, Bolivia pada periode 1984-1987 mengganti mata uang lama dengan mata-uang baru (sanering) 1 juta banding 1, Irak pada periode 1987-1995 sebesar 10.000 banding 1, Nicaragua pada periode 1988-1991 sebesar 50 Miliar banding 1, Argentina pada periode 1975- 1993 nilai tukar 100 Miliar banding 1, Peru pada periode 1986-1991 sejumlah 1 Miliar banding 1, Yugoslavia pada periode 1989-1994 berakhir dengan 10^{27} (terbilang 10 pangkat 27) banding 1, Polandia pada periode 1989-1994 berakhir pada 10 Ribu banding 1, Zaire

pada periode 1989-1996 berakhir pada 300 Miliar banding 1, Angola pada periode 1991-1999 nilai tukar berakhir pada 1 Miliar banding 1, Bosnia dan Herzegovina pada periode 1992-1993 tingkat inflasi mencapai 10.000 banding 1, Belarus pada periode 1994-2002 nilai tukar berakhir pada 1 Miliar banding 1, Zimbabwe pada periode 1998-2008 secara keseluruhan berdampak $1 = 10^{25}$ (terbilang sepuluh pangkat 25).

David Baur, 2021, menyajikan artikel berjudul *Hyperinflationary economies at 31 December 2021*, antara lain mengemukakan bahwa Argentina masuk wilayah inflasi-hiper pada tahun 2018, dan diramalkan akan tetap demikian pada tahun setelah periode 3 tahun kumulatif diatas 100 % sejak 2018, sehingga wajib menerapkan standar akuntansi inflasi-luarbiasa, disamping Islamic Republic of Iran, Lebanon, South Sudan, Sudan, Suriname (mulai 2021), Venezuela, Yemen (mulai 2021) dan Zimbabwe. Pada tahun 2022, risiko wajib-terap akuntansi inflasi-luarbiasa tertandai pada negara-negara Angola, Ethiopia (baru 2021) dan Haiti, mungkin juga termasuk Afghanistan (baru 2021) dan Syrian Arab Republic.

Penerapan SAK tentang akuntansi hiperinflasi pada LK individual dan LK Konsolidasian mempunyai banyak aspek pertimbangan manajemen. SAK Inflasi-Hiper mewajibkan entitas LK menyesuaikan LK kepada tingkat daya-beli (purchasing power) mata uang pada tanggal pelaporan LK. Pada model pemeliharaan-modal (capital maintenance), laba direalisasi tatkala berbagai unit daya-beli-konstan pada akhir-periode melebihi/mengatasi aset-neto awal-periode setelah memisahkan distribusi kepada PS. Penerapan SAK Inflasi-Hiper meminta pertimbangan, keputusan dan peng-andalan pada informasi eksternal seperti berbagai indeks harga, dibantu berbagai sarana TI dan pakar terkait hukum dan kondisi yuridiksi-akuntansi cq negara tersebut. Terdapat berbagai negara yang menggunakan kebijakan Nilai-Tukar-Tetap nan-resmi (official) harus diindahkan entitas yang bereksistensi pada yuridiksi tersebut. Standar pelaporan internasional menyatakan bahwa kondisi hiperinflasi terjadi tatkala rerata tingkat inflasi mencapai 100 % sepanjang tiga tahun.

Menurut IMF, inflasi dunia dewasa ini sebesar 3,6 % pertahun. Sumber Trading Economics Jan 2022, menyatakan 10 negara berinflasi tertinggi, adalah Venezuela 1198.0%, Sudan 340.0%, Lebanon 201.0%, Syria 139.0%, Suriname 63.3%, Zimbabwe 60.7%, Argentina 51.2% dan Turki 36.1%. Penyebab Inflasi adalah (1) inflasi tertarik permintaan (demand pull inflation) dimana permintaan tinggi tak terlayani pasok, harga-umum-naik, jumlah pelanggan mampu-beli menyusut menimbulkan kurva pasok-permintaan baru, (2) inflasi terdorong kenaikan biaya produksi (cost push inflation), dan (3) inflasi terancang asumsi-inflasi-berlanjut (built in inflation), menyebabkan harga-harga cenderung naik, tarif umum imbalan kerja naik, menyebabkan harga pokok produksi & harga jual terus menerus meningkat.

Penyebab deflasi adalah kejatuhan permintaan agregat, kenaikan pasok agregat. Penurunan permintaan-agregat disebabkan kenaikan suku-bunga bank-sentral menyebabkan penurunan pasok-uang cq kredit. Deflasi menimbulkan pesimisme-massal akan masa-depan perekonomian, menyebabkan peningkatan tabungan dan pengurangan-konsumsi. Kenaikan pasok-agregat disebabkan biaya-produksi menurun, kemajuan teknologi, menyebabkan persaingan-menajam, bisnis dan jumlah pemain/pemasok/produsen menurun

Berbagai negara seperti Hong Kong, Netherlands, Switzerland, Sweden, Ireland, Jepang, Saudi Arabia, Togo, Aruba dan Brunei Darussalam berisiko mengalami deflasi. Sebuah jurnal bisnis terbitan the Wharton School of the University of Pennsylvania, 2015, menyajikan artikel berjudul *Deflation: Why Europe's Problem Is Everyone's Problem*, antara lain mengungkapkan bahwa Deflasi antara lain disebabkan penurunan harga migas global.

Sebagai penyebab pelambatan pertumbuhan ekonomi, berisiko depresi-ekonomi dan stagnasi-ekonomi, deflasi adalah situasi tingkat-harga-umum merosot, menyebabkan harga-harga barang/jasa lebih murah bagi konsumen, laba lebih kecil karena harga-jual makin mendekati titik-impas (*break-even point*) atau terpaksa jual dibawah titik-impas.. Pada situasi konsumen memiliki uang lebih sedikit untuk belanja, permintaan agregat menurun, menyebabkan situasi surplus-pasok, pengurangan produksi dan SDM, penurunan kebutuhan kredit menyebabkan penusutan suku-bunga-kredit menekan margin-industri-perbankan, berisiko meningkatkan pengangguran. European Central Bank (ECB) melakukan relaksasi-perekonomian atau *quantitative easing* (QE) bertujuan pelemahan mata-uang Euro dengan injeksi likuiditas melalui pembelian obligasi negara dan swasta, sambil melihat-lihat dampaknya pada perubahan tingkat-inflasi kembali menuju sekitar 2 %.

Untuk menahan laju-inflasi, the Fed dan berbagai bank sentral lazimnya melancarkan kebijakan moneter kontraksioner (*contractionary monetary policy*) dengan cara mengurangi pasok-uang-beredar, mengurangi gairah konsumsi/belanja publik, menurunkan tingkat kegiatan ekonomi, untuk menurunkan tingkat inflasi.

Robert C Kelly pada Investopedia Team, 2021, menjelaskan Debt Deflation, antara lain sebagai berikut. Deflasi Utang (Debt deflation) atau kenaikan nilai-sejati utang (real value of debt) terjadi tatkala harga-harga jatuh, imbalan-kerja dan nilai-aset menekan kemampuan para peminjam menuju risiko gagal-bayar utang, lalu mencipta spiral deflasionair berupa kredit-macet perbankan, berujung likuidasi dan penyitaan agunan-kredit.

TEORI INDEKS HARGA

Pada berbagai negara terdapat *Consumer Price Index (CPI)*, *Implied Exchange Rate Price Index*, *Exchange Rate Price Index*, dan/atau *Wholesale Price Index(WPI)*. Pada umumnya, akuntansi pemerintahan negara-negara memperhatikan indeks digunakan lembaga-terkemuka seperti PBB, LK negara adi-daya ekonomi & akuntansi. Berbagai negara menggunakan bauran beberapa indeks.

Pada umumnya rerata berbagai komoditas tersebut tidak mampu menggambarkan perubahan-harga tiap komoditas, sebagian rerata harga-umum dan perubahan harga-umum berstandar-deviasi besar, berkemungkinan lebih besar dari rerata-harga itu sendiri. Blair Fix, 2021, menyajikan artikel berjudul *The Truth About Inflation*, antara lain menyatakan berbagai hal sebagai berikut. Bagi Milton Friedman (1960), inflasi adalah fenomena moneter dimana APBN Belanja terlampaui besar, pencetakan dan manajemen pasok uang-kartal sembarangan. Pada kenyataannya, terdapat divergensi tingkat-inflasi pada berbagai rumpun barang/jasa, misalnya harga pangan (tertentu) naik 10 %, harga mobil (tertentu) naik 30 %, harga-busana (tertentu) turun 5 %, sehingga Jonathan Nitzan (1990) menyebut inflasi adalah sebuah proses restrukturisasi perekonomian, restrukturisasi budaya dan restrukturisasi kekuasaan. Persamaan (*equation*) ciptaan para pakar seringkali bertaraf naif, dangkal, keliru bahkan menggelikan walau lulus uji korelasi. Sebagai misal, persamaan $MV=PT$ karya Milton Friedman, dimana V adalah tingkat perputaran uang (velocity of money) dan T adalah indeks nilai-sejati semua transaksi, sehingga teori inflasi dapat dibuktikan, menimbulkan pertanyaan apakah benar pencetakan-uang semata adalah penyebab inflasi, tanpa sebab lain(?), misalnya peningkatan hasrat meminjam uang menyebabkan kebutuhan tambahan jumlah-uang beredar, kebangkrutan entitas produsen tertentu menyebabkan pasok barang/jasa tertentu menurun sementara permintaan konstan. Notasi P mewakili rerata tingkat harga adalah penyederhanaan menyedihkan sebagai sarana pemrediksi perilaku harga-umum. Penggunaan

hampiran rerata juga amat naif, me-rata-rata harga apel naik dan harga jeruk turun, merata-rata jumlah tabungan perkapita dan banyak lagi yang lain, menghasilkan informasi menyesatkan. Penyimpangan/ Deviasi umumnya, deviasi-baku (*standard deviation*) khususnya kurang mendapat tempat (dituduh disembunyikan) pada proses-analisis, termasuk fenomena menggelikan, dimana deviasi atau deviasi-baku lebih besar dari rerata. Joan Robinson menyatakan bahwa gagasan “rerata tingkat harga” adalah sarana-salah-ajar (miseducation) ditangan para ekonom; *central tendency* versi rerata-harga-umum konsumen atau pedagang besar (CPI atau WPI) nan-stabil tak mencerminkan harga-individual barang/jasa juga stabil. Pada dunia-nyata, perubahan harga amat-tak-seragam, sehingga info perubahan harga-umum mungkin tak layak-guna. Studi Jonathan Nitzan & Shimson Bichler, 1990, menyimpulkan bahwa terdapat dampak-distribusional dari inflasi, bahwa unit bisnis besar ternyata diuntungkan oleh inflasi, bahwa kemampu-labaan bisnis-besar lebih tinggi dibanding unit-usaha yang lain, karena dalam posisi oligopoli, mereka lebih-cepat atau lebih-dahulu melakukan kebijakan-kenaikan-harga.

KEBIJAKAN AS

Berlatar belakang guncangan pasok-permintaan era-pandemi, gangguan rantai-pasok, berbagai kebijakan stimulus-fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya, perubahan belanja konsumsi, partisipasi tenaga-kerja menurun dan ketidak-pastian bisnis masa depan.



Empat skenario masa-depan AS adalah (1) keseimbangan baru mengatasi disrupsi rantai-pasok dan perubahan permintaan akan barang/jasa (Blue Skies), (2) perubahan/penyesuaian badan-usaha dan konsumen pada kondisi disrupsi rantai-pasok dan pasok-TK nan-konstan menghasilkan pemberesan tingkat-inflasi pada 3-4% menuju 2024 (Sun Showers), (3) inflasi naik ketingkat 8-9% karena tuntutan kenaikan imbalan kerja serikat buruh, menekan belanja-konsumsi dan operasi-bisnis (Stormy Weather), (4) disinflasi menuju 1% sebagai dampak resolusi pemberesan-kemacetan rantai-pasok (Downdraft). Opsi teoretis strategi-terpilih AS pada situasi (1) Blue Skies adalah persiapan dini raih-peluang paska-pandemi, restrukturisasi utang-publik pada industri-keuangan, strategi merger-akuisisi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, (2) Sun Showers adalah mitigasi kenaikan biaya input, perbaikan kinerja, investasi untuk pertumbuhan ekonomi menggunakan suku-bunga sedang rendah untuk pelanjutan/pengembangan bisnis, (3) Stormy Weather adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan hampiran skala-keekonomian dan alih-teknologi untuk strategi penghematan biaya, diversifikasi usaha, mitigasi risiko inflasi dengan strategi lindung-nilai. (4) Downdraft adalah kapitalisasi pengalaman-baru dan diferensiasi tawaran produk/jasa untuk meningkatkan permintaan, rasionalisasi pemasok dan mitra-usaha untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan berlamban persepsi & ekspektasi pasa/pelanggan.

PERTIMBANGAN METODE AKUNTANSI

Dampak inflasi pada akuntansi persediaan adalah sebagai berikut. Harold Averkamp, 2022, menyajikan artikel berjudul *How does inflation affect the cost of goods sold?*, dengan subjudul *Inflation and the Cost of Goods Sold*, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut. Penjualan pada periode inflasi pada umumnya meningkatkan harga pokok produksi barang terjual. Terdapat tiga jenis pilihan alur-biaya (cost-flow) yang diterapkan secara taat-azas (

konsisten) yang berpengaruh pada penilaian-persediaan (inventory valuation), laba-bruto, laba-operasional dan laba-bersih, pembayaran PPh dan PPN, dan aspek-lain. Metode FIFO menghasilkan harga pokok produksi barang terjual lebih rendah, Metode LIFO menghasilkan harga pokok produksi barang terjual lebih tinggi, Metode Rerata adalah kompromi dua metode sebelumnya.

Secara konseptual, pada era inflasi, Metode FIFO menyebabkan nilai-persediaan tertinggi, laba-bruto , laba-operasional meningkat karena harga pokok produksi barang terjual lebih rendah, PPh lebih besar, laba-neto paska-pajak lebih besar bersifat ilusi saja (illusory profit, phantom profit) karena digerus kenaikan-harga-input yang akan datang , menyebabkan berbagai entitas LK beralih dari Metode FIFO menjadi metode LIFO.

Secara konseptual, pada era inflasi, Metode LIFO memindahkan kenaikan biaya pada harga pokok produksi barang terjual , menyebabkan margin-laba menipis, meringankan beban pajak, lebih disukai para ekonom karena (1) menghapus ilusi laba versi FIFO, (2) harga pokok produksi barang terjual dekat dengan harga pokok produksi barang terjual selanjutnya , (3) ideal untuk penetapan-harga baru berbasis “cost plus”,(4) efisiensi beban pajak , (5) laba-neto layak guna untuk belanja input-bertendensi-naik-harga.

Sumber lain menyatakan bahwa Metode Identifikasi Khusus (*Specific Identification Method*) tak dipengaruhi inflasi/deflasi, pada FIFO Method persediaan-berumur-lebih-tua berharga-pokok lebih rendah dibanding sediaan-lebih-baru pada situasi ekonomi berinflasi, sebaliknya pada LIFO Method, Metode Rerata Tertimbang (*Weighted Average Inventory Method*) akan bernilai di antara FIFO dan LIFO Method.

TEORI INFLASI SEHAT/NORMAL VS INFLASI LUAR-BIASA

Makalah berjudul *ARGENTINA: The Impact of Hyperinflation on Accounting*, 2019, menjelaskan antara lain berbagai hal sebagai berikut. Perekonomian sehat memiliki tingkat inflasi di antara 1% sampai 5 % pertahun. Di Argentina, inflasi diukur melalui indeks , yaitu Indeks Harga Pedagang Besar (the Domestic WPI (Wholesale Price Index)) sampai tahun 2016, mulai tahun 2017 menggunakan Indeks Harga Konsumen (the CPI atau Consumer Price Index) . Inflasi 2018 sebesar 47,6 % dan cenderung naik. LK pada periode inflasi-hiper berisiko menyajikan informasi-terdistorsi bila tak peduli kondisi inflasi-luar biasa, sehingga semua besaran/angka dalam LK perlu disesuaikan agar dinyatakan (expressed) pada daya-beli mata-uang pada akhir periode LK atau tanggal pelaporan LK, sedemikian rupa sehingga LK berguna sebagai dasar pengambilan keputusan pembaca LK pada situasi inflasi bertingkat rerata 100 % atau lebih sepanjang 3 tahun, dan diramalkan akan berlanjut membesar. *The Argentine Federation of Professional Councils in Economics Sciences* (FACPCE) menerbitkan General Resolution 539/18 yang bertujuan menyediakan kerangka-pikir kebijakan tentang penyesuaian-ulang LK (*re-adjustment of financial statements*) pada intinya mengatur bahwa (1) penyesuaian untuk inflasi (*adjustment*) diterapkan pada tahun-fiskal yang dimulai tanggal 07/01/2018 , LK berakhir pada tanggal 06/30/2018 ber CALK menjelaskan bahwa penyesuaian untuk inflasi bukan wajib, bahwa koefisien penyesuaian-ulang (*the re-adjustment coefficient*) digunakan adalah perpaduan WPI dan CPI, bahwa metode penyesuaian-ulang (readjustment) sesuai Pedoman berjudul *Technical Resolution 6* . Argentina tidak mengetahui dampak penyesuaian karena inflasi , misalnya dampak pada pelaporan PPh Wajib Pajak.

Kebijakan konvensional pemerintah dalam memerangi inflasi pada umumnya dengan (1) kebijakan moneter berupa mengurangi-uang beredar dengan operasi pasar terbuka (menjual SBI), meningkatkan bunga-deposito untuk memikat tabungan-masyarakat, menaikkan cadangan-wajib lembaga-perbankan, kebijakan perkreditan yang lebih-ketat, sanering, penghancuran uang-kartal lama, penghentian pencetakan uang-kartal, (2) Kebijakan fiskal atau kebijakan APBN dengan kebijakan penurunan belanja tertentu yang mungkin, kebijakan tarif pajak lebih tinggi, (3) kebijakan lain seperti meningkatkan pasok dan produktivitas sektor riil mengimbangi jumlah-uang beredar, relaksasi kebijakan impor-barang, kebijakan imunisasi cq mencegah impor dari negara berinflasi tinggi, kebijakan harga maksimum, kebijakan larangan penimbunan komoditas tertentu, dan kebijakan pencegahan eskalasi tarif UMR.

Negara	Bulan kadar inflasi tertinggi	Kadar inflasi bulanan tertinggi	Persaman kadar inflasi harian	Masa diperlukan untuk harga menjadi 2 kali ganda
Hungary	Julai 1946	$1.30 \times 10^{16}\%$	195 %	15.6 jam
Zimbabwe	Pertengahan November 2008	79,600,000,000%	98%	24.7 jam
Yuhoslavia	Januari 1994	313,000,000%	64.6%	1.4 hari
Jerman	Oktober 1923	29,600%	20.9%	3.7 hari
Greece	November 1944	11,300%	17.1%	4.5 hari
China	Mei 1949	4,210%	13.4%	5.6 hari

Kebijakan Non-Konvensional Pemerintah pada situasi inflasi luar biasa dengan bauran kebijakan yang mencakupi (1) kebijakan moneter pengendalian harga,(2) kebijakan keuangan negara nan-tepat sasaran & efisien, (3) kebijakan tarif bunga kredit perbankan untuk mendorong produktivitas perekonomian, (4) kerjasama global anti-inflasi-tinggi, terutama pada aspek pengelolaan utang negara, mencegah capital outflow dari emerging-market melalui kesepakatan SDR USD 100 M versi G20 International Financial Architecture Working Group (IFA WG), (5) menekan potensi lonjakan harga energi & komoditas lain melalui relaksasi-tegangan geo-politik pada tataran global, mengambil hikmah sumber BeritaSatu, dengan Redaksi Investor Daily, 2022, yang mengunggah artikel berjudul *Kendalikan Kenaikan Inflasi, Indef Sarankan Bauran Kebijakan*.

BERBAGAI STANDAR AKUNTANSI

Kevin Bogle, 2022, menyajikan artikel berjudul *Hyperinflationary economies*, antara lain mengutarakan bahwa akuntansi untuk operasi di LN berubah secara mendasar apabila negara tersebut ber-inflasi-hiper. Perspektif standar akuntansi untuk operasi LN pada yuridiksi ber inflasi-hiper adalah penting bagi MNC, terkait (1) isu LK dua versi, yaitu versi IFRS dan versi US GAAP, (2) kebijakan akuntansi yang mampu mengayomi usaha-LN pada negeri-negeri ber-inflasi-sehat, negeri-negeri ber-deflasi dan negeri-negeri ber-inflasi-luar-biasa, khususnya pada proses translasi saldo-valas, proses penyusunan LAK berbagai yuridiksi mata-uang, penyusunan LK unit-unit usaha yang diwajibkan negara setempat dalam mata-uang setempat.

Indikator Inflasi-Luar-Biasa IFRS/IPSAS adalah

1. Penduduk memilih menyimpan kekayaan tidak dalam mata-uang domestik, memilih mata uang asing dan aset-nonmeneter.
2. Penduduk dalam bertransaksi , misalnya menetapkan harga jual barang/jasa, tidak menggunakan mata-uang-domestik, namun mata uang-asing ber nilai stabil.
3. Jual/beli secara kredit mempertimbangkan kehilangan-daya-beli (purchasing power) periode kredit, termasuk kredit jangka-pendek.
4. Suku bunga, imbalan kerja dan harga terhubung dengan suatu indeks-harga.
5. Tingkat inflasi kumulatif sepanjang 3 tahun mendekati/melebihi 100 %.

US GAAP menggunakan Metode Dua Tahap untuk penetapan situasi ekonomi ber-inflasi-hiper.

- Tahap 1. Lakukan analisis kuantitatif untuk menghitung tingkat inflasi kumulatif sepanjang 3 tahun dimuka LK , apakah melebihi 100 %. Pertimbangan khusus dilakukan apabila terdapat beberapa jenis indek-umum sebagai pengukur inflasi.
- Tahap 2. Bila hasil kalkulasi Tahap 1 kurang dari 100 %, gunakan pertimbangan sehat berdasar trend inflasi historis , kualitas statistik nasional dan berbagai faktor ekonomi lain.

INTISARI IPSAS 10

Paragraf 2 IPSAS 10 menyatakan bahwa pada situasi perekonomian ber-inflasi-hiper, LK berbasis mata-uang domestik tak bermanfaat untuk di baca . Tatkala mata-uang kehilangan daya-beli , berbagai transaksi serupa walau dalam periode akuntansi yang sama, tak-dapat diperbandingkan , dijelaskan Paragraf 3 IPSAS 10.

Standar tak menentukan besaran-absolut tingkat inflasi di mana situasi inflasi-luar-biasa terjadi , sehingga pelaku akuntansi mempertimbangkan sendiri penggunaan IPSAS 10.

Inflasi-luar biasa antara lain terindikasi oleh (1) preferensi publik menggunakan mata uang asing yang dinilai stabil, publik cenderung se-segera-mungkin menggunakan mata-uang domestik untuk belanja barang atau investasi pada bidang tahan-inflasi, (2) transaksi tak-menggunakan satuan mata uang-domestik , harga jual/beli dinyatakan pada suatu mata-uang asing tertentu, (3) harga transaksi kredit jual/beli memasukkan unsur kompensasi ekspektasi-kerugian akibat penurunan/kehilangan daya-beli mata-uang-domestik, walau jangka kredit amat-pendek , (4) suku-bunga, imbalan-kerja dan harga terhubung indeks-harga, (5) tingkat inflasi kumulatif dalam 3 tahun mendekati atau melebihi 100 %.

IPSAS 10 digunakan pada awal periode inflasi-luar-biasa, misalnya pada suatu bulan , triwulan, tahun atau 3 tahun dengan lonjakan inflasi di atas 100 %.

IPSAS 10 menyajikan definsi nilai terbawa aset dan liabilitas yang terakui pada Laporan Neraca, kas, berbagai jenis aset-moneter dan nonmoneter.

Perubahan harga-harga lintas-waktu disebabkan perubahan ekonomi seperti pasok/permintaan, sosial, budaya seperti selera dan teknologi, dan perubahan politik , yang berdampak pada daya-beli mata uang negara itu.

LK historis mungkin hanya berguna untuk pertanggungjawaban integritas keuangan, informasi tersebut tak seberapa berguna bagi pengambilan-keputusan sehingga LK perlu disajikan pada kondisi nilai-tukar mata-uang pada tanggal LK..

Bila situasi inflasi-luarbiasa terjadi, Paragraf 9 IPSAS 10 menyatakan bahwa penyajian informasi keuangan versi IPSAS 10 menggantikan informasi LK masa inflasi-normal adalah

wajib, tak boleh sekadar sebagai lampiran LK versi era-normal. Entitas LK dilarang membuat dua versi LK, yaitu LK versi-inflasi normal dan LK versi-inflasi-luarbiasa. Informasi anggaran dalam LK Inflasi-Luarbiasa dinyatakan-ulang sesuai IPSAS 10 Paragraf 10.

LK entitas NKRI yang menggunakan mata-uang asing (bila diizinkan) yang sedang mengalami inflasi luar-biasa, harus menjelaskan unit pengukuran (measuring unit) pada tanggal laporan, sehingga LK perbandingan yang menyajikan LK periode lalu dinyatakan-kembali pada unit-pengukuran tersebut, sesuai Paragraf 11 IPSAS 10.

Laporan Kinerja Keuangan menyajikan Surplus Posisi Moneter Neto dan Defisit Posisi Moneter Neto secara terpisah sesuai Paragraf 12 IPSAS 10.

Laporan Neraca dinyatakan-ulang dengan indeks-harga-umum, sesuai Paragraf 14 IPSAS 10, kecuali (1) pos moneter yang dinyatakan dengan kurs-tetap, kurs-perjanjikan sesuai Paragraf 16, atau telah dinyatakan dengan nilai-tukar terkini pada tanggal LK sesuai Paragraf 15 IPSAS 10, (2) aset/liabilitas non-moneter yang terbawa pada nilai-kini, seperti nilai-realisasi-bersih atau nilai-pasar pada tanggal pelaporan LK., sesuai Paragraf 17 IPSAS 10. Berbagai aset non-moneter ber-harga-perolehan historis dan ber-akumulasi-penyusutan disesuaikan dengan indeks-harga-umum pada tanggal neraca sesuai Paragraf 18 IPSAS 10.

Bila nilai-mata uang saat perolehan aset tidak diketahui lagi, entitas dianjurkan standar menggunakan pakar-luar entitas, sesuai Paragraf 19 IPSAS 10 membantu pembentukan saldo-awal era inflasi-luarbiasa.

estimasi dilakukan menggunakan contoh pilihan basis-estimasi, misalnya untuk mengukur pergerakan nilai tukar antara mata-uang-fungsional dengan suatu mata-uang-asing relatif stabil, sesuai Paragraf 20 IPSAS 10.

Nilai terbawa Aset Properti Bangunan-Pabrik dan Sarana (Property, Plant & Equipment) yang akan dinyatakan-ulang biasanya adalah nilai tanggal-perolehan atau tanggal-revaluasi setelah perolehan pra-saji-ulang, sesuai Paragraf 21 atau tanggal-penurunan-nilai (impairment) sesuai Paragraf 22.

Pada era-inflasi-luarbiasa LK Investee dinyatakan-ulang sesuai IPSAS 10 untuk kalkulasi bagian investor pada tataran Metode Ekuitas. Saji-ulang LK investee dalam mata-uang-asing diterjemahkan dengan nilai-tukar tanggal-neraca sesuai Paragraf 23.

Biaya pinjaman (*borrowing cost*) mungkin (1) sebagian masuk pada proses kapitalisasi perolehan/konstruksi kecuali terdapat-alasan tidak mengkapitalisasi sesuai Paragraf 25, (2) sebagian lagi masuk beban tahun berjalan, yang harus disikapi berbeda dampaknya pada Laporan Neraca & Laporan Surplus-Defisit, sesuai Paragraf 23 IPSAS 10.

Pada awal periode penerapan IPSAS 10, komponen ekuitas/aset-neto dinyatakan-ulang dengan Indeks-Harga-Umum, kecuali pos (1) akumulasi surplus/defisit, (2) cadangan revaluasi AT/ATB. Seluruh Cadangan-Revaluasi timbul pada periode lalu di eliminasi. Pernyataan ulang Akumulasi Surplus/Defisit adalah hasil kalkulasi dari saji-ulang seluruh pos-neraca yang lain, sesuai Paragraf 26 IPSAS 10.

Pada akhir-periode LK dan periode selanjutnya, Ekuitas/Aset-Neto dinyatakan-ulang dengan Indeks-Harga-Umum, perubahannya diungkapkan sesuai IPSAS 1, sesuai Paragraf 27 IPSAS 10.

IPSAS 1 tentang *Statement of Changes in Net Assets/Equity*, mewajibkan berbagai hal sebagai berikut.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan surplus/defisit periode LK, setiap butir/item

pendapatan dan beban terakui langsung pada pos-ekuitas periode tersebut, jumlah pendapatan/beban teratribusi pada entitas-pengendali dan kepada pemilik-non-pengendali, dampak perubahan kebijakan-akuntansi & koreksi kesalahan sesuai IPSAS 3.118.

Entitas boleh-pilih menyajikan pada Laporan Neraca atau pada Laporan Perubahan Ekuitas; transaksi dengan pemilik entitas, saldo awal/akhir akumulasi surplus/defisit, rekonsiliasi dan pengungkapan/penjelasan setiap komponen pos ekuitas awal & akhir periode pelaporan, perubahan naik/turun ekuitas awal/akhir periode, bagian perubahan surplus/defisit bukan karena pendapatan/beban.

Laporan Kinerja Keuangan tersaji pada nilai-mata-uang tanggal pelaporan LK, menggunakan Indeks- Harga-Umum , sejak awal periode pencatatan pendapatan dan beban, sesuai Paragraf 28 IPSAS 10.

Pada suatu periode inflasi, sebuah entitas LK mempunyai lebih aset-moneter di atas liabilitas-moneter mengalami kerugian-daya-beli dan suatu entitas dengan lebih liabilitas-moneter di atas aset-moneter memperoleh lebih/keuntungan-daya-beli untuk rumpun aset dan liabilitas tak-terkait pada suatu tingkat-harga. Surplus/defisit pada posisi-moneter-neto (net monetary position) diperoleh sebagai selisih dihasilkan oleh saji-ulang aset-non-moneter, akumulasi surplus/defisit dan berbagai butir (items) dalam Laporan Kinerja Keuangan dan penyesuaian indeks aset & liabilitas terhubung/terkait.

Surplus/defisit diestimasi dengan penerapan Indeks-Harga-Umum ber-rata-rata-tertimbang untuk periode selisih aset-moneter dan liabilitas-moneter, sesuai Paragraf 29 IPSAS 10.



Surplus/Defisit posisi moneter neto tercakupi pada Laporan Kinerja Keuangan. Penyesuaian (adjustment) terhadap aset/liabilitas terhubung (linked) dengan perjanjian kepada perubahan-harga sejalan dengan Paragraf 16 di saling-hapus-buku / ofset terhadap surplus/defisit posisi-moneter-neto.

Berbagai butir (items) dalam Laporan Kinerja Keuangan seperti bunga pendapatan atau bunga beban, dan beda nilai-tukar terkait dana-terinvestasi atau dana-pinjaman, juga dikaitkan dengan posisi-moneter-neto.

Walau berbagai butir (items) tersebut diungkapkan terpisah, adalah baik juga kalau surplus/defisit posisi-moneter-neto dimasukkan dalam Laporan Kinerja Keuangan.

Suaian (*adjustment*) aset/liabilitas terhubung (*linked*) kepada perubahan-harga dibuat sesuai Paragraf 16 di-saling-hapus-buku (*offset*) terhadap surplus/defisit posisi-moneter-neto.

Laporan Arus Kas dinyatakan-ulang pada nilai-mata-uang tanggal pelaporan LK, sesuai Paragraf 31 IPSAS 10.

Informasi perbandingan berupa data-periode LK yang lalu dinyatakan-ulang dengan Indeks-Harga-umum agar ber-daya-banding , bila beda-mata-uang , sesuai paragraf 47(b) dan 48 dari IPSAS 4 sebagai berikut:.

- Beda nilai-tukar terkait Paragraf 44 IPSAS 4 yang disebabkan translasi saldo awal aset/ekuitas pada tanggal LK yang berbeda dengan nilai-tukar-akhir sebelumnya.

- Beda nilai-tukar tersebut tidak terakui dalam surplus/defisit karena perubahan nilai-tukar tak-berpengaruh atau berpengaruh-kecil pada arus-kas hasil-operasional sekarang dan masa-depan.
- Bila beda-nilai-tukar terkait kegiatan-LN terkonsolidasi namun tak-sepenuhnya-dimiliki, akumulasi beda-nilai-tukar yang timbul dari translasi dan teratibusi pada pemilik-bukan-pengendali teralkokasi pada, dan diakui sebagai bagian kepemilikan-minoritas dalam Laporan Neraca Konsolidasian.
- Laporan Neraca dan Laporan Kinerja Keuangan entitas ber-mata-uang-fungsional dalam perekonomian ber-inflasi-luarbiasa wajibditranslasi kedalam mata-uang penyajian berprosedur sebagai berikut. Pertama, seluruh jumlah tiap butir/item aset,liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk data-terkomparasi, harus disajikan pada nilai-tutup (closing rate) tanggal sama/terdekat dengan tanggal LK, kecuali translasi kedalam mata-uang tidak-dalam kondisi-ekonomi-ber-inflasi-luarbiasa, jumlah-jumlah komparatif wajib disajikan sebagai jumlah tahun-berjalan dalam LK tahun sebelumnya (tak disesuaikan kepada perubahan tingkat-harga atau nilai-tukar selanjutnya.

Tentang implikasi pada LK Konsolidasian, terdapat kewajiban sebagai berikut :

- LK Entitas Kendalian (controled entity) yang wajib disesuaikan dengan (a) mata-uang LK Entitas Pengendali , bila beda negara/yuridiksi, (2) dinyatakan dengan Indeks-Harga-Umum yang digunakan Entitas Pengendali, sesuai Paragraf 32 IPSAS 10.
- LK Entitas Kendalian tak-berada pada perekonomian ber-inflasi-luar-biasa , yang tak menggunakan IPSAS 10, berurusan dengan IPSAS 4, sesuai Paragraf 32 IPSAS 10.
- LK Entitas Kendalian (controled entity) ber tanggal LK tak sama dengan LK Entitas Pengendali yang wajib disesuaikan dengan nilai-mata-uang saat konsolidasi , dan alih-mata uang pelaporan (bila berbeda mata-uang) sesuai kurs tanggal-konsolidasi, sesuai Paragraf 34 IPSAS 10.

Pada saat era inflasi luar-biasa berakhir, entitas LK memasuki era inflasi normal kembali, entitas LK menghentikan penerapan IPSAS 10 dengan saldo awal nilai-terbawa tersaji pada LK akhir periode era-inflasi-luar-biasa, sesuai paragraf 35. LK perbandingan periode inflasi-normal menyebabkan LK periode sebelumnya disesuaikan dengan periode normal.

CALK mengungkapkan fakta saji-ulang LK karena perubahan daya-beli (purchasing power) dengan nilai-mata-uang (terdepresiasi) tanggal LK, pengungkapan identitas & tingkat perubahan Indeks-Harga –umum dengan periode sebelumnya, sesuai paragraf 37, terutama pembuktian akumulasi inflasi mendekati/melebihi 100 % dalam periode 3 tahun terakhir .

PENUTUP

Indonesia berposisi jauh dari risiko inflasi luar biasa, walau dua masalah ekonomi dunia saat ini adalah kenaikan harga energi dan kenaikan harga pangan , berlatar belakang perang dan endemi, juga mewarnai perekonomian NKRI, pada kondisi siaga satu berpotensi muncul pada tataran global tahun 2023.

Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia , 2022, menyajikan artikel berjudul **PBB: Harga Beras Dunia Naik, di Indonesia Bagaimana?**, menyatakan bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB (FAO) mencatat, kenaikan harga beras. Pada Indeks Harga edisi Juni 2022, FAO mengungkapkan, harga beras di bulan Mei 2022 naik ke level tertinggi dalam setahun, yaitu berada pada level 109,2 poin, naik 3,5% dibandingkan April 2022, lonjakan tajam terjadi untuk semua jenis beras.

Reporter bernama Fajar Pebrianto , 2022, menyajikan artikel berjudul *Kala Jokowi Menghela Napas dan Geleng-geleng Lihat Inflasi Pangan Global Melesat* . Presiden Joko Widodo menampilkan data lonjakan pangan global saat acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jumat, 11 Maret 2022. Sumber: youtube Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), menyatakan bahwa Presiden menggelengkan kepala, menghela napas seraya mengangkat bahu, saat bicara tentang lonjakan inflasi pangan global. Jokowi menampilkan data inflasi di beberapa negara yang sudah mencapai dua digit. Inflasi pangan di Rusia mencapai 12,3 persen, Amerika Serikat 6,9 persen, Turki 55,6 persen, India 5,4 persen dan kawasan Uni Eropa 4 persen, bersyukur bahwa inflasi pangan di Indonesia pada angka 3 persen. Kelangkaan pangan mulai terjadi di beberapa negara. Harga pangan dunia sedang bergerak naik.

Data *Food Agriculture Organization* (FAO) berupa *Food Price Index* menyatakan bahwa indeks harga pangan terus bergerak naik dari level 101 saat gelombang Covid-10 varian Alpha, level 125,3 saat gelombang varian Delta, dan mencapai level 140,7 saat terjadi perang.



Level 140,7 adalah indeks per Februari 2022, naik 3,9 persen dari torehan Januari dan lebih tinggi 20,7 persen secara tahunan (*year-on-year*). Indonesia terkena imbas (harga) kedelai dunia yang naik, diakselerasi pula oleh harga gandum. Hampir 20 persen lebih gandum dunia berasal dari Ukraina dan Rusia, perang memberi berbagai dampak lanjutan , antara lain embargo, kelangkaan pangan dan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Editor Antara, Ali Akhmad Noor Hidayat, 2022 menyajikan artikel berjudul **Jokowi Ungkap Indonesia Masih Bisa Jaga dan Kendalikan Inflasi** , antara lain mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mengendalikan inflasi di saat sejumlah negara lain mengalami lonjakan harga barang dan jasa karena ketidakpastian global. Di Amerika Serikat, inflasi telah meningkat hingga 8,3 persen dari trend lazim disekitar satu persen. Di Indonesia, inflasi tercatat 3,55 persen (*year on year/yooy*) hingga Mei 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Presiden meminta semua pihak untuk peka terhadap krisis.

Diperkirakan sekitar 60 negara akan mengalami kesulitan ekonomi, yang berisiko menjadi *negara gagal* ¹kalau tak dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Dua masalah ekonomi saat ini adalah kenaikan harga energi dan kenaikan harga pangan. Komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan gas telah mengalami kenaikan harga di pasar global. Di Indonesia, harga pakan-ternak naik, harga telur, harga ayam naik , kedelai naik 33 persen, padahal harga tahu & tempe bila naik berimbas kepada inflasi.

Ade Hapsari Lestarini , 2022, melansir *Xinhua* , menyajikan artikel berjudul **Harga Minyak Dunia Menguat, Tembus USD122/Barel**, menyatakan antara lain bahwa harga minyak dunia menguat tipis,

¹ Negara gagal adalah sebuah negara tanpa pemerintahanan efektif, pemerintah tak sanggup melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok termasuk keamanan.

misalnya harga *West Texas Intermediate* (WTI) untuk pengiriman Juli bertambah 26 sen atau 0,2 persen menjadi USD120,93 per barel di *New York Mercantile Exchange*, harga minyak-mentah brent untuk pengiriman Agustus naik 26 sen atau 0,2 persen menjadi USD122,27 per barel di London ICE Futures Exchange.

Kebijakan Non-Konvensional Pemerintah pada situasi inflasi luar biasa dengan bauran kebijakan yang mencakupi (1) kebijakan moneter pengendalian harga,(2) kebijakan keuangan negara nan-tepat sasaran & efisien, (3) kebijakan tarif bunga kredit perbankan untuk mendorong produktivitas perekonomian, (4) kerjasama global anti-inflasi-tinggi , terutama pada aspek pengelolaan utang negara, mencegah *capital outflow* dari *emerging-market* melalui kesepakatan SDR USD 100 M versi *G20 International Financial Architecture Working Group* (IFA WG) , (5) menekan potensi lonjakan harga energi & komoditas lain melalui relaksasi-tegangan geo-politik pada tataran global.

Kebijakan fiskal NKRI bertradisi amat disiplin, defisit APBN dijaga di bawah 3 persen dari PDB dan utang dijaga di bawah 30 persen dari PDB , sehingga adopsi IPSAS 10 tak seberapa dirasa mendesak. Standar tentang akuntansi transaksi & pelaporan dalam mata uang asing tak terkait dengan akuntansi/pelaporan LK pada kondisi inflasi-luarbiasa. Diperkirakan tak ada perubahan berbagai PMK NKRI tentang sistem akuntansi pemerntahan yang sedang berjalan bila KSAP mengadopsi IPSAS 10, karena *akuntansi inflasi luar biasa* mirip dengan pembuatan LK dalam mata-uang lain selain Rupiah, sebagai proses pada muara-saja.

Tak ada pembahasan dampak/risiko redenominasi Rupiah pada perubahan cetak-biru RAPBN.

LK berbasis konsep Akuntansi Inflasi dapat menjadi suplemen LK².

Jakarta, Medio Juni 2023

² Inflation accounting, also called *price level accounting*, is similar to **converting financial statements into another currency using an exchange rate**. Under some (not all) inflation accounting models, historical costs are converted to price-level adjusted costs using general or specific price indexes.

